

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2014. *Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*. PT. Rajawali Pers: Jakarta
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta..
- Andi Hamzah, 2005. *Perbandingan Korupsi di berbagai Negara*. Sinar Grafika: jakarta
- Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2001. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
- Evi Hartanti, 2016. *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta
- Larisa V. Gorbunova et. Al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015).
- Leden Marpaung, 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Peradilan*. CV Mandar Maju: Bandung.
- Moelijatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk mencegah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Eresco: Bandung.

Yudi Kristiana, 2016. *Tindak Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Progresif*.

Yusran Lapananda, 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*.  
Sinar Grafika: Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana

### **Sumber Lainnya**

<http://megapolitan.kompas.com>, 24 Juni 2018